

BAB III

PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010—2014

3.1 Kondisi Wilayah Jawa Bali Saat Ini

3.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Seluruh provinsi di wilayah Jawa-Bali menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2008 (**Tabel 3.1**). Selama tahun 2004—2008, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi dicapai di Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,04 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah terjadi di DI Yogyakarta sebesar 4,54 persen. Sementara itu, provinsi lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata sebesar 5,5-5,8 persen selama kurun waktu yang sama.

TABEL 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
DKI Jakarta	5,7	6,0	5,9	6,4	6,2
Jawa Barat	4,8	5,6	6,0	6,5	5,8
Jawa Tengah	5,1	5,3	5,3	5,6	5,5
D.I Yogyakarta	5,1	4,7	3,7	4,3	4,9
Jawa Timur	5,8	5,8	5,8	6,1	5,9
Banten	5,6	5,9	5,6	6,0	5,8
Bali	4,6	5,6	5,3	5,9	6,0

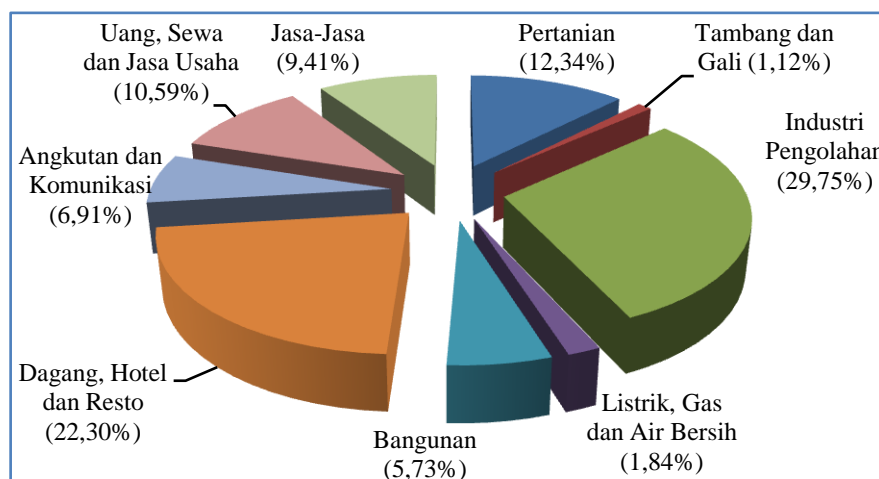
Sumber : Badan Pusat Statistik

Struktur perekonomian wilayah Jawa-Bali ditandai dengan makin berkembangnya sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2008, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 29,75 persen, perdagangan hotel dan restoran mencapai 22,30 persen, keuangan persewaan dan jasa perusahaan mencapai 10,59 persen, serta jasa-jasa mencapai 9,41 persen. Kontribusi sektor pertanian masih cukup tinggi, yaitu sebesar 12,34 persen. Tingginya alih fungsi lahan pertanian akan menjadi hambatan

bagi pengembangan sektor pertanian dan menjadi masalah bagi ketahanan pangan di wilayah Jawa-Bali.

Sektor unggulan wilayah Jawa-Bali, antara lain, adalah sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Bali; sektor perdagangan, hotel dan restoran di Provinsi Banten dan Jawa Timur; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; sektor jasa-jasa di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, sektor pengangkutan dan komunikasi di Provinsi DKI Jakarta.

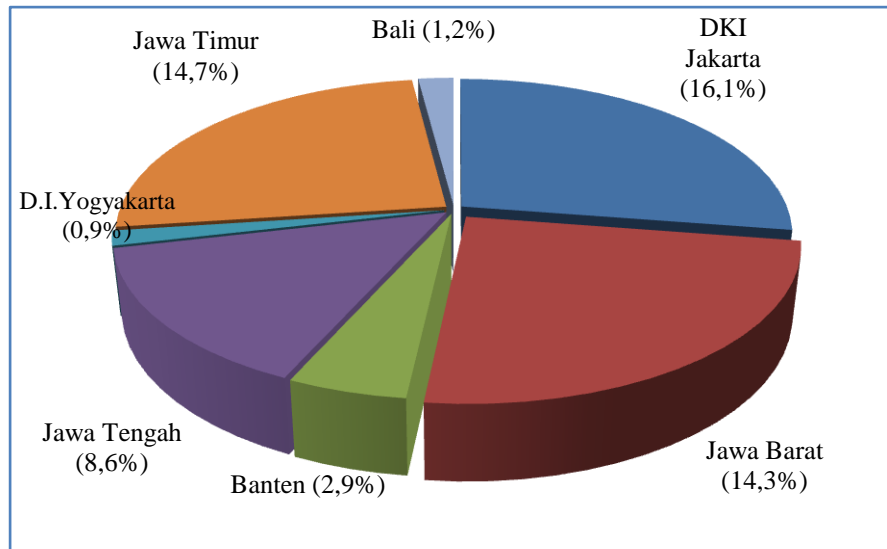
GAMBAR 3.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Jawa-Bali terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 sekitar 58,8 persen. Kontribusi perekonomian wilayah Jawa Bali terhadap perekonomian nasional merupakan yang terbesar, terutama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara sumbangan provinsi lain terhadap perekonomian nasional masih rendah, yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,9 persen, Bali sebesar 1,2 persen, dan Banten sebesar 2,9 persen.

GAMBAR 3.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, daya tarik investasi wilayah Jawa-Bali sangat tinggi, terbukti dari nilai realisasi investasi yang terpusat di wilayah ini. Dari total nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2008, lebih dari 91 persen berlangsung di wilayah Jawa Bali. Sedangkan, untuk nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), wilayah ini menyumbang sebesar 60,20 persen. Jika Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan lokasi pilihan PMA, maka Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan lokasi utama PMDN.

Dalam lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali terus meningkat secara nyata. Namun, perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain. Ketimpangan pendapatan per kapita ini menyebabkan tingginya arus migrasi menuju Provinsi DKI Jakarta (**Tabel 3.2**).

TABEL 3.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

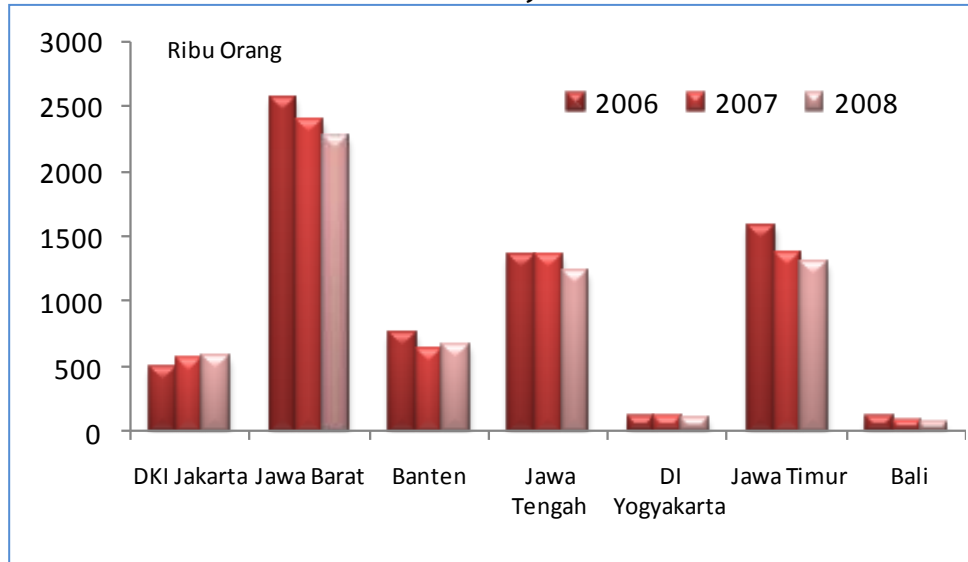
Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
DKI Jakarta	31.832	33.205	34.837	36.733	38.654
Jawa Barat	5.957	6.204	6.480	6.799	7.091
Jawa Tengah	4.173	4.488	4.690	4.914	5.143
D.I Yogyakarta	5.009	5.025	5.157	5.326	5.538
Jawa Timur	6.640	7.027	7.393	7.801	8.217
Banten	6.012	6.406	6.634	6.903	7.168
Bali	5.876	6.188	6.444	6.752	7.082

Sumber : Badan Pusat Statistik

Wilayah Jawa-Bali masih menjadi konsentrasi penduduk Indonesia (sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia) dengan luas wilayah Jawa Bali hanya 7 persen dari luas wilayah nasional. Jumlah angkatan kerja di wilayah Jawa-Bali tahun 2000 sebesar 62,7 persen dari total angkatan kerja di Indonesia dan sedikit berkurang menjadi 61,7 persen pada tahun 2008. Jika dilihat dari persebarannya, sebanyak 65,9 persen pengangguran terbuka tahun 2000 berada di wilayah Jawa-Bali dan berkurang sedikit menjadi 64,4 persen pada tahun 2008. Sementara itu, pengangguran terbuka di wilayah Jawa Bali sebesar 6,4 persen dari jumlah angkatan kerja tahun 2000 meningkat menjadi 10 persen pada tahun 2004, dan menurun menjadi 8,8 persen pada tahun 2008.

Pengangguran terbuka dari tahun 2000 sampai tahun 2008 sebagian besar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,1 persen, Jawa Barat 12,3 persen, dan Banten 14,1 persen. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari rata-rata pengangguran wilayah Jawa Bali sebesar 8,8 persen. Tingginya pengangguran disebabkan oleh posisi Jabodetabek yang sangat dominan dalam perekonomian nasional dan menjadi magnet besar bagi pencari kerja sehingga terjadi penumpukan angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur di daerah tersebut.

GAMBAR 3.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali dalam periode 2007—2009 cenderung menurun, baik dari jumlah maupun persentase penduduk miskin. Persentase jumlah penduduk miskin wilayah Jawa-Bali pada tahun 2007—2009 mencapai lebih dari 50 persen dari total jumlah penduduk miskin Indonesia. Persentase penduduk miskin sebagian besar berada di Provinsi Jawa Tengah (17,7 persen), DI Yogyakarta (17,2 persen), dan Jawa Timur (16,7 persen). Persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dan Bali tercatat paling rendah, yaitu masing-masing sebesar 3,6 persen dan 5,1 persen (**Tabel 3.3**).

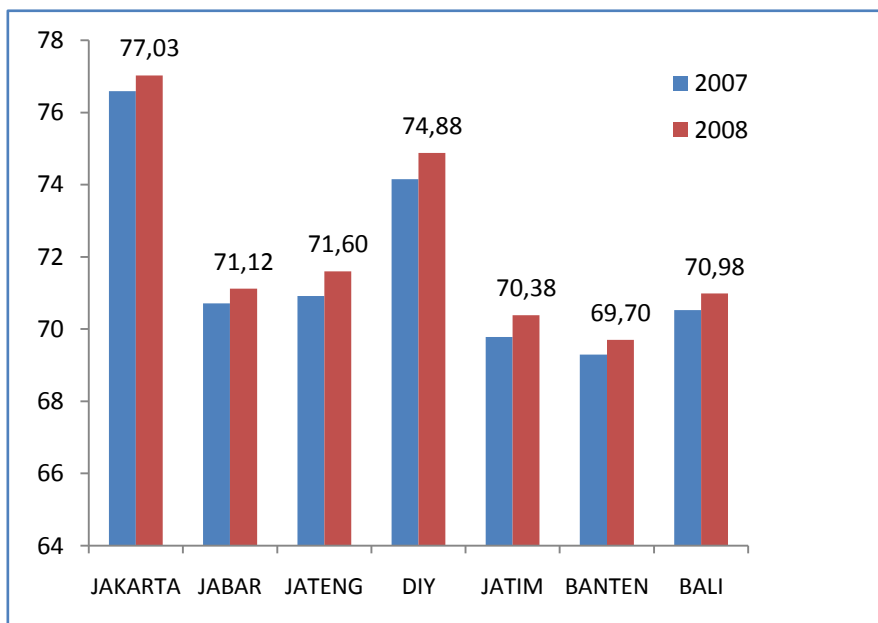
TABEL 3.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
DKI Jakarta	4,6	4,3	3,6
Jawa Barat	13,6	13,0	12,0
Jawa Tengah	9,1	8,2	7,6
D.I Yogyakarta	20,4	19,2	17,7
Jawa Timur	19,0	18,3	17,2
Banten	20,0	18,5	16,7
Bali	6,6	6,2	5,1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa kualitas sumber daya manusia wilayah Jawa-Bali ternyata masih perlu ditingkatkan dalam menghadapi persaingan global. IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,03, sedangkan IPM terendah di Banten hanya mencapai 69,70 pada tahun 2008. Provinsi Banten, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Barat memiliki nilai IPM di bawah rata-rata IPM Nasional 2008 sebesar 71,17.

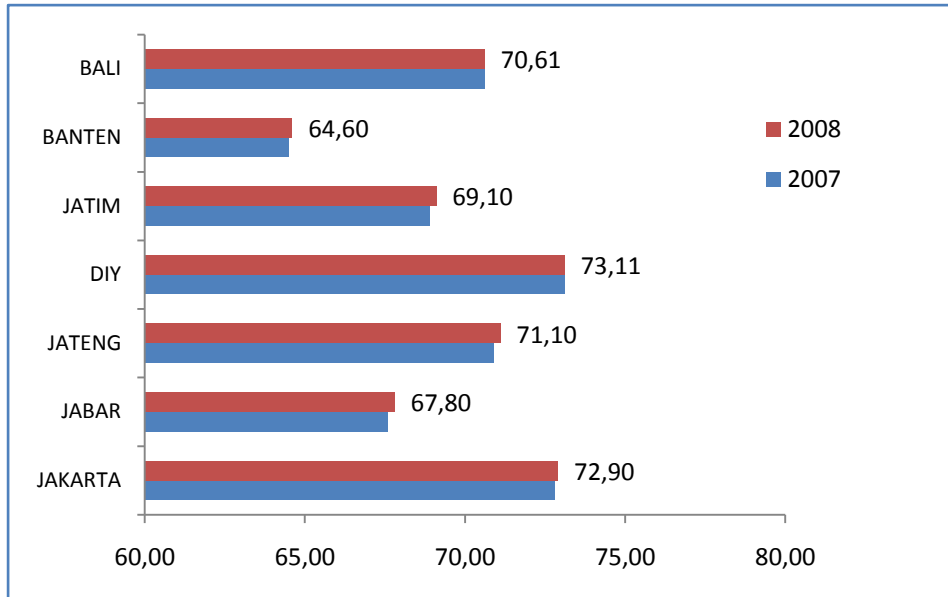
GAMBAR 3.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Umur Harapan Hidup (UHH) per provinsi di wilayah Jawa-Bali menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi. Umur harapan hidup tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan umur harapan hidup terendah berada di Banten. Jika dilihat dari umur harapan hidup provinsi, Banten masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain. Perkembangan umur harapan hidup antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut.

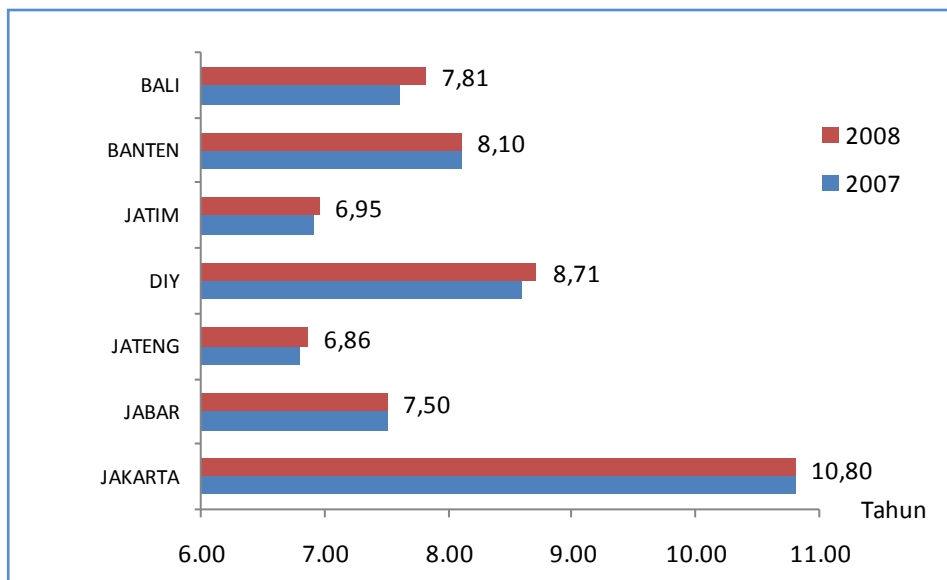
GAMBAR 3.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka rata-rata lama sekolah di beberapa provinsi di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2007—2008 menunjukkan kesenjangan antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain di wilayah Jawa Bali. Rata-rata lama sekolah terendah berada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah (**Gambar 3.6**).

GAMBAR 3.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2008



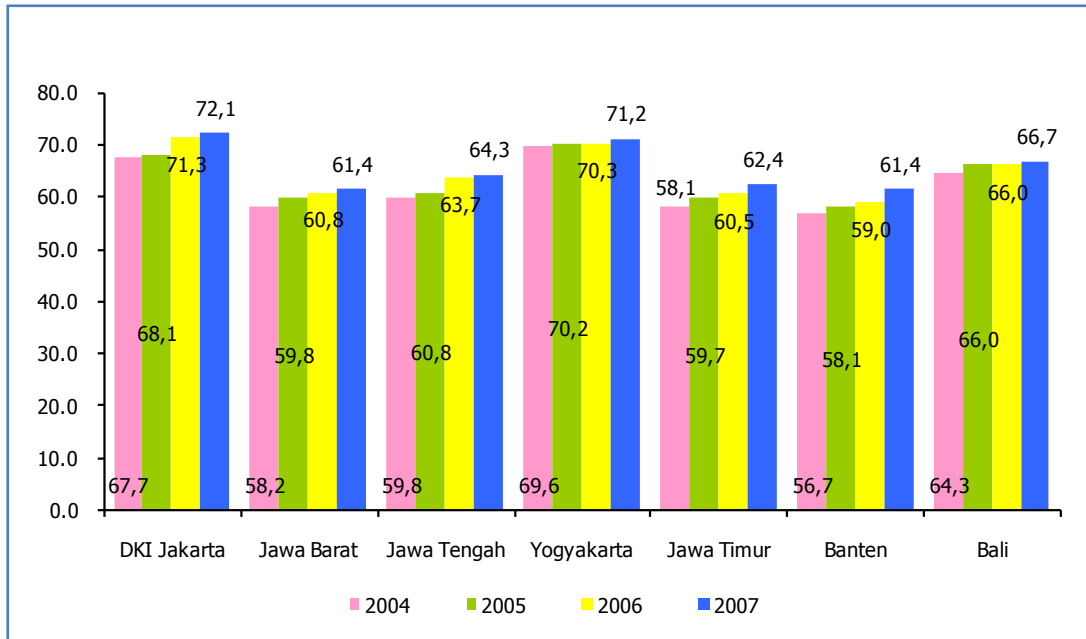
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Jawa-Bali, IPG setiap provinsi meningkat pada tahun 2007. Peringkat tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 72,1 dan diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 71,2. Nilai IPG di empat provinsi lain masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. Nilai terendah berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 61,4, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali.

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur melalui partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Jawa-Bali, IDG tahun 2007 untuk tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. DKI Jakarta berada di peringkat tertinggi dengan nilai 62,9, sedangkan Banten berada di peringkat terendah dengan nilai 48,8. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun

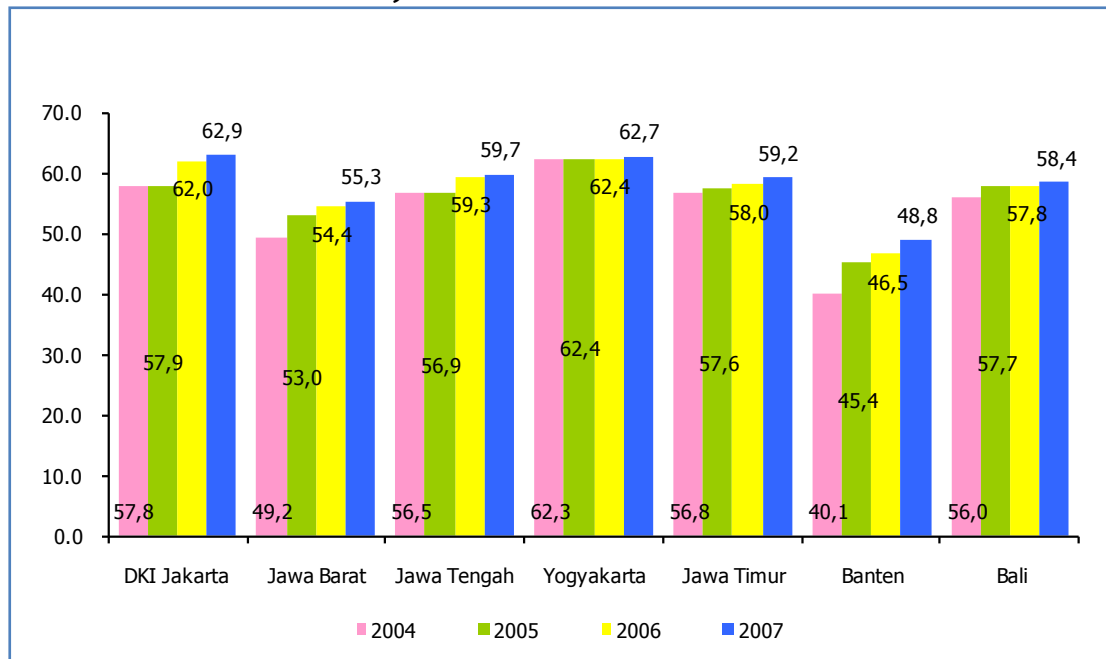
mendatang.

GAMBAR 3.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

GAMBAR 3.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Dalam bidang ketahanan pangan, wilayah Jawa-Bali merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi pangan tertinggi. Namun, selama tahun 2002—2006 kontribusi produksi pangan wilayah Jawa-Bali menunjukkan kecenderungan menurun. Dari subsektor peternakan, potensi peternakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga cukup besar. Sementara itu, dari perikanan, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga memiliki potensi yang cukup tinggi. Tantangan yang muncul adalah tingginya alih fungsi lahan di wilayah Jawa-Bali yang menghambat upaya mewujudkan ketahanan pangan, baik wilayah maupun nasional.

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur. Kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Jawa-Bali relatif lebih memadai jika dibandingkan dengan wilayah lain. Akses antarwilayah dapat dilalui melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam tiga kelas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan untuk tingkat provinsi, kerapatan jalan

tertinggi secara nasional terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yakni 1,68 km/km², DI Yogyakarta sebesar 1,47 km/km², dan Jawa Tengah sebesar 0,72 km/km². Berdasarkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan roda empat yang mengindikasikan kapasitas jalan, kapasitas jalan terendah secara nasional, adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,0004 km/unit kendaraan, Bali sebesar 0,0141 km/unit kendaraan, dan Jawa Barat sebesar 0,0190 km/unit kendaraan.

GAMBAR 3.9
PETA POTENSI RAWAN BENCANA ALAM DAN DAERAH TERTINGGAL
WILAYAH JAWA-BALI



Legenda :

- Kawasan Bencana
- Kawasan Bencana dan Daerah Tertinggal

Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Hampir seluruh wilayah Jawa-Bali termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam baik gempa bumi, longsor, dan banjir. Daerah yang sangat rawan longsor tersebar di wilayah Jawa-Bali, terluas di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah bagian barat. Daerah potensi banjir tersebar, terbanyak di daerah pantura dan kawasan lain yang umumnya daerah rendah, terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara. Daerah rawan banjir banyak terdapat di wilayah pertanian dan perkotaan sehingga akan mengancam ketahanan pangan dan investasi. Wilayah Jawa-Bali juga mengalami serangkaian kejadian bencana alam. Berdasarkan data dan fakta, telah terjadi serangkaian bencana alam berupa gempa di Provinsi



Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banjir akibat air pasang (rob) di DKI Jakarta, dan Jawa Tengah; meningkatnya tanah longsor di wilayah selatan Jawa yang memiliki struktur tanah labil dan topografi berbukit dan bergunung. Penyebaran daerah rawan bencana secara jelas dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Berdasarkan kinerja kelembagaan pemerintahan, kinerja pembangunan wilayah Jawa-Bali masih diwarnai oleh tingkat korupsi yang tinggi. Ibu Kota Provinsi di Jawa-Bali memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang rendah kecuali Yogyakarta. Kota Semarang berada di urutan ke-21, Surabaya di urutan ke-31, Denpasar di urutan ke-32, Jakarta di urutan ke-36, dan Bandung di urutan ke-43 (TII, 2008). Sementara itu, kinerja pertahanan dan keamanan ternyata masih diwarnai oleh ancaman terjadinya aksi-aksi terorisme. Kejadian peledakan bom di DKI Jakarta dan Bali menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit dan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan investasi.

3.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi dan permasalahan di wilayah Jawa-Bali, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Jawa-Bali yaitu sebagai berikut:

1. **Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali** ditunjukkan oleh rendahnya produktivitas ekonomi kawasan perdesaan; lemahnya keterkaitan desa kota; rendahnya produktivitas ekonomi kawasan selatan Jawa; dan lemahnya keterkaitan utara-selatan Jawa dan keterkaitan antarwilayah di selatan Jawa. Hal ini disebabkan oleh lemahnya akses kepada lahan dan modal serta lemahnya pengembangan kegiatan *off farm* yang menurunkan produktivitas kawasan perdesaan, lemahnya keterkaitan hulu hilir aktivitas ekonomi yang secara spasial memperlemah keterkaitan desa-kota, lemahnya aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa dan antarwilayah selatan di Jawa yang memperlemah keterkaitan utara selatan Jawa dan lemahnya pengembangan potensi ekonomi yang ramah lingkungan berupa aktivitas ekowisata.
2. **Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali** ditunjukkan oleh tingginya produktivitas ekonomi dan investasi di Provinsi DKI Jakarta; dan tingginya potensi peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Permasalahan yang dapat menjadi hambatan dan ancaman adalah lemahnya birokrasi pengurusan perizinan, lemahnya infrastruktur penunjang investasi terutama transportasi, air bersih dan energi, serta menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai bentuk gangguan lingkungan terutama banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air.
3. **Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional** ditunjukkan oleh rendahnya ekspor nonmigas yang bernilai tambah tinggi; rendahnya nilai surplus perdagangan internasional di

Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah; dan belum optimalnya pemanfaatan jalur-jalur perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengembangan produk unggulan yang berupa produk olahan nonmigas, masih terbatasnya jaringan perdagangan internasional, dan masih terbatasnya infrastruktur penunjang kegiatan ekspor impor.

4. **Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian** ditunjukkan oleh tingginya potensi untuk mengembangkan industri unggulan di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; dan tingginya potensi sektor jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Permasalahan yang dapat menjadi hambatan dan ancaman adalah masih lemahnya pengembangan potensi industri unggulan, masih lemahnya dukungan teknologi dan kapasitas SDM untuk menunjang pengembangan sektor industri dan jasa, dan masih diperlukannya dukungan infrastruktur penunjang sektor industri dan jasa khususnya transportasi, energi dan air bersih.
5. **Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional** ditunjukkan oleh produksi pertanian pangan yang mulai menurun di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; tingginya konversi lahan sawah di Jawa Barat dan Jawa Timur; belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; makin menurunnya skala ekonomi aktivitas pertanian di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali; dan makin menurunnya ketersediaan air untuk aktivitas pertanian. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penyuluhan dan introduksi teknologi dalam pertanian pangan, lemahnya pengendalian konversi lahan pangan, rendahnya pengembangan potensi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing) dan unggas, rendahnya pengembangan potensi perikanan darat dan perikanan tangkap, menurunnya perluasan lahan petani dan meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan, kurangnya pemeliharaan infrastruktur irigasi, dan rusaknya daerah-daerah resapan air.
6. **Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya** ditunjukkan oleh konsentrasi penduduk yang tetap terpusat di Jawa dan tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dan Banten. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan program transmigrasi yang bertujuan untuk mendorong pemerataan distribusi penduduk dan sekaligus mendorong pembangunan daerah dan lemahnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
7. **Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi** ditunjukkan oleh rendahnya penyerapan tenaga kerja dari perkembangan

aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Banten dan rendahnya kemampuan wirausaha angkatan kerja terdidik yang masih menganggur di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, yaitu industri unggulan yang memiliki keterkaitan hulu hilir dan/atau industri unggulan yang bersifat padat karya, lemahnya kemampuan *entrepreneurship* angkatan kerja.

8. **Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta** ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin; rendahnya upah riil penduduk miskin; dan rendahnya produktivitas penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh lemahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, lemahnya perlindungan terhadap buruh miskin, serta lemahnya bantuan modal untuk mendorong usaha mikro.
9. **Menurunnya daya dukung lingkungan** ditunjukkan oleh rendahnya jenis tutupan lahan hutan di kawasan hutan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur; rendahnya jenis tutupan lahan hutan di kawasan hutan lindung di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten; luas RTH di wilayah kota-kota di Jawa Bali (Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, Yogyakarta) di bawah amanat UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 yaitu sebesar 30%; luas tutupan hutan di sebagian besar sub DAS (di luar 10 sub DAS yang telah memiliki tutupan hutan total > 30 persen) di bawah amanat UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, yaitu sebesar 30 persen; tingginya ancaman bahaya banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; tingginya ancaman bahaya longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur; luasnya lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Bali; makin menurunnya kualitas dan kuantitas air. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan lindung, lemahnya upaya pemeliharaan dan pemulihan untuk kawasan lindung yang mengalami kerusakan; lemahnya pengelolaan tata air; dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kapasitas lahan.
10. **Tingginya kasus tindak pidana korupsi** ditunjukkan oleh tingginya kasus korupsi karena birokrasi yang terlalu kompleks, rendahnya kecepatan pelayanan dan transparansi pengurusan perizinan, dan lemahnya penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya reformasi birokrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien, belum berkembangnya sistem informasi pengurusan perizinan yang memadai, dan lemahnya kinerja lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi.
11. **Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital** ditunjukkan oleh menurunnya keamanan di objek vital akibat aksi terorisme dan munculnya

gerakan radikal dalam masyarakat yang berpotensi mendorong aksi terorisme. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan aksi terorisme.

12. **Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global** ditunjukkan oleh masih rendahnya kapasitas SDM untuk mengisi kesempatan kerja di sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa perdagangan dan pariwisata) di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; Rendahnya IPM di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali terutama terjadi karena Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rataan Lama Sekolah (RLS); serta tingginya ancaman penyakit menular. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengembangan sekolah kejuruan untuk mengisi kebutuhan tenaga-tenaga terampil, sebaran prasarana kesehatan dan pendidikan yang masih terbatas di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat kota, dan lemahnya pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit menular.
13. **Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat** ditunjukkan oleh tingginya kerugian berupa jiwa, harta benda, dan kerusakan infrastruktur di kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah selatan Jawa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya permukiman di kawasan rawan bencana, belum terbangunnya infrastruktur dan bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih lemahnya kesiapan mitigasi bencana.

3.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan capaian pembangunan dan isu strategis serta arahan yang tercantum dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, pembangunan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk:

1. mengoptimalkan kinerja perekonomian di wilayah Jawa-Bali;
2. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
3. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali untuk mengembangkan kerja sama internasional.

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali, pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budi daya hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; (3) mempertahankan sumber

air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) meningkatkan upaya pendukung nilai budaya daerah; (10) meningkatkan upaya pengembangan kekayaan budaya daerah; (12) meningkatkan pendukung pengelolaan museum daerah; (13) meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (14) meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (15) memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (16) meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (17) meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (18) meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Jawa-Bali ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara.

Pengembangan PKN di wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan perkotaan Jabodetabek, perkotaan Bandung, Gerbangkertosusila, dan perkotaan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota-kota Pandeglang, Rangkas Bitung, Cianjur, Purwakarta-Cikampek, Sumedang, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, Boyolali, Klaten, Salatiga, Pekalongan, Kudus, Cepu, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Bantul, Sleman, Jombang, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Tulung Agung, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Sampang, Sumenep, Singaraja, Negara, dan Semarapura sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mengendalikan perkembangan kota-kota Cilegon, Sukabumi, Kuningan, Tegal, Kebumen, dan Situbondo sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di wilayah Jawa-Bali ditetapkan melalui peraturan



daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Jawa-Bali.

3.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pembangunan, tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang melalui pembangunan wilayah Jawa-Bali adalah untuk:

1. mempertahankan kinerja pembangunan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional;
2. mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
3. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama internasional;
4. meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali;
5. mengendalikan pertumbuhan pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya;
6. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budi daya hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah;
7. mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun;
8. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah desa-kota dan wilayah utara Jawa bagian utara dan bagian selatan;
9. meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan melalui pencegahan aksi-aksi terorisme;
10. meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, sasaran pengembangan wilayah Jawa-Bali untuk tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,

kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran;

2. menurunnya konsentrasi penduduk di wilayah Jawa-Bali;
3. mewujudkan kawasan lindung sebesar 30 persen dari wilayah Jawa-Bali;
4. mewujudkan wilayah DAS sebesar 30 persen dari luas wilayah DAS;
5. menurunkan indeks gini PDRB/kapita wilayah Jawa-Bali perdesaan perkotaan dan wilayah utara selatan menjadi < 0.2 ;
6. meningkatnya stabilitas keamanan dari aksi terorisme;
7. membaiknya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk kota-kota di wilayah Jawa-Bali.

TABEL 3.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	6,5 - 7,1	6,9 - 7,7	2,75 - 2,69	0,54 - 0,53	10,3 - 11,4	8,3 - 9,2
Jawa Barat	5,0 - 5,6	6,2 - 6,8	9,12 - 8,91	4,15 - 4,12	10,4 - 11,5	8,8 - 9,8
Jawa Tengah	6,2 - 6,8	7,1 - 7,7	14,92 - 14,34	11,58 - 11,37	7,1 - 7,8	5,4 - 6,0
DI Yogyakarta	4,8 - 5,3	6,2 - 6,9	15,36 - 15,03	11,87 - 10,76	5,5 - 6,1	4,3 - 4,7
Jawa Timur	5,8 - 6,4	7,1 - 7,8	14,62 - 14,24	11,23 - 10,95	6,5 - 7,2	5,7 - 6,3
Banten	5,9 - 6,4	6,5 - 7,2	6,79 - 6,23	3,13 - 3,09	15,4 - 17,0	14,9 - 16,5
Bali	5,8 - 6,1	6,8 - 7,3	4,12 - 4,01	1,12 - 1,11	4,4 - 4,9	3,4 - 3,7

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 3.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA
DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	8	7	11,6	12,4	75,84	76,51	41.394,40	48.539,90
Jawa Barat	27	24	8,10	8,70	70,36	71,41	7.535,00	8.650,10
Jawa Tengah	21	18	7,44	8,08	72,21	73,06	6.183,00	8.402,80
DI Yogyakarta	9	8	8,98	9,46	75,62	76,39	6.346,40	8.372,40
Jawa Timur	25	21	7,46	8,02	71,09	72,27	9.458,60	12.228,40
Banten	32	29	8,50	8,90	69,26	70,06	8.665,00	11.724,10
Bali	13	12	8,24	8,88	70,09	74,48	8.096,20	10.311,10

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas

*Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

⁴⁾ Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah pengembangan, tujuan dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Jawa-Bali, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pembangunan wilayah perdesaan, dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten;

- b. pemberian bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali;
 - c. pengembangan kegiatan *off farm* untuk meningkatkan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali;
 - d. peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal.
2. Penguatan keterkaitan desa kota dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan rantai industri unggulan agroprimer di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
3. Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa;
 - b. pengembangan PKN Cilacap dan PKN Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah selatan Jawa;
 - c. pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
4. Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi dengan strategi pengembangan:
 - a. menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta dari aspek perizinan, stabilitas keamanan;
 - b. meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi;
 - c. menurunkan gangguan lingkungan terutama banjir dan longsor serta meningkatkan kualitas dan kuantitas air di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
5. Percepatan transformasi struktur ekonomi di Jawa-Bali dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. pemantapan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional;
 - b. pengembangan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri.
6. Peningkatan nilai surplus perdagangan internasional dilakukan dengan strategi pengembangan:

- a. meningkatkan jumlah produk industri pengolahan berkualitas ekspor di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
 - b. memperluas jaringan perdagangan internasional di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur;
 - c. mengoptimalkan fungsi pelabuhan hub internasional di Tanjung Priok/Bojonegara, Tanjung Perak/Tanjung Bumi – Surabaya/Madura, dan Tanjung Emas – Semarang untuk menunjang aktivitas ekspor impor;
 - d. mengoptimalkan PKN Semarang dan PKN Gerbangkertosusila sebagai simpul penting perdagangan internasional.
7. Pengembangan industri unggulan potensial dilakukan dengan strategi:
- a. mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil, gula pasir, pupuk, semen di Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil di Provinsi Banten;
 - c. mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, tekstil dan produk tekstil, rokok kretek, gula pasir, semen di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, rokok kretek, gula pasir, pupuk di Provinsi Jawa Timur;
 - e. mengembangkan industri kecil dan menengah pada industri kreatif terutama kerajinan, seni pertunjukan, desain, layanan komputer dan piranti lunak, serta riset dan pengembangan di Provinsi DI Yogyakarta.
8. Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengembangkan teknologi di bidang jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
 - b. mengembangkan kualitas SDM di bidang jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
9. Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;



- b. mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur;
 - c. mengembangkan peternakan domba dan kerbau di Provinsi Jawa Barat;
 - d. mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali;
 - e. mengembangkan peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah;
 - f. mengembangkan ternak kecil ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah;
 - g. mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta;
 - h. mengembangkan perikanan kolam (air tawar) di Provinsi Jawa Barat;
 - i. mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur;
 - j. meningkatkan luas pengusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
 - k. mengembangkan sistem insentif dan disinsetif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;
 - l. mendorong transformasi angkatan kerja pertanian ke nonpertanian melalui peningkatan kualitas angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali;
 - m. membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budi daya pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
10. Pengembangan pola distribusi penduduk di wilayah Jawa-Bali secara lebih seimbang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Banten;
 - b. mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar Jawa;
 - c. mengembangkan kota-kota kecil dan menengah.

11. Pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten;
 - b. peningkatan kemampuan wirausaha SDM angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pengendalian migrasi tenaga kerja tanpa keterampilan ke kota-kota besar dan metropolitan.
12. Pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di Provinsi DI Yogyakarta, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta;
 - b. melindungi buruh miskin perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan buruh miskin perkotaan di Provinsi DI Yogyakarta;
 - c. menyediakan bantuan modal untuk usaha mikro di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
13. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
 - b. meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 30% di Kota DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta;
 - c. melakukan rehabilitasi daerah resapan air di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;
 - d. melakukan rehabilitasi di lahan-lahan yang rawan longsor di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
14. Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan DAS;
 - b. melakukan rehabilitasi kawasan sempadan sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
 - c. melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

- d. melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali;
 - e. mengendalikan pemanfaatan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
15. Penanganan ancaman bencana banjir dan longsor dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
 - b. meningkatkan kesiapan mitigasi bencana longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
16. Peningkatan pemberantasan korupsi akibat kompleksitas birokrasi, proses perizinan, dan lemahnya penegakan hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. melakukan reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten;
 - b. mengembangkan sistem pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang transparan dan akuntabel;
 - c. meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Provinsi DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya dan Denpasar.
17. Meminimalkan ancaman terorisme dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. meningkatkan kemampuan aparat untuk mencegah aksi terorisme di Provinsi DKI Jakarta dan Bali;
 - b. meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.
18. Pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa) dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan pendidikan kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
19. Peningkatan IPM di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali terutama dari komponen AHH dan RLS dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur kesehatan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten;



- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali;
 - c. mengendalikan dan mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
20. Minimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan bangunan yang mampu menahan dampak bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali;
 - c. mengembangkan kesiapan mitigasi bencana di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.